

BAB V

PEMBINAAN SISTEM AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA: SUATU PEMIKIRAN IMPLEMENTATIF

Motto : Accreditation cannot allow itself to be used for purposes other than evaluating and encouraging educational quality.

Kenneth E. Young
(1979).

Jika perguruan tinggi tidak diharapkan akan menjadi salah satu unsur perusak kecerdasan bangsa tidak ada cara yang lebih baik daripada meningkatkan dan menjamin ketinggian mutunya. Persoalannya, bagaimana caranya? Sistem apa yang harus dipergunakan? Siapa yang harus melakukannya? Apa standar ketinggian mutu itu? Banyak lagi pertanyaan yang dapat diajukan. Dari pembicaraan pada bab-bab terdahulu sudah dapat dilihat bahwa sistem akreditasi, kecuali tampaknya cocok untuk diterapkan di Indonesia, juga landasan formalnya sudah pula ada yaitu Surat Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972.

Walaupun sistem itu pada dasarnya, bersumber dari negara Amerika Serikat dan Kanada, namun bila diperhatikan prinsip-prinsip utamanya, sistem itu dapat dilepaskan dari ikatan kebudayaan dan hubungan persyaratan dengan kondisi dan situasi masyarakat negeri asalnya tersebut. Sistem akreditasi adalah suatu bentuk pengawasan yang demokratis dalam pembinaan, peningkatan dan penjaminan suatu pendidikan. Sistem ini bertolak pangkal pada asumsi bahwa dunia

pendidikan tinggi dapat mengkaji dan mengawasi dirinya sendiri baik karena sifatnya yang otonom maupun karena peranan dan tanggung jawabnya yang besar bagi pengembangan pendidikan, ilmu, dan kebudayaan.

Pembinaan sistem akreditasi di Indonesia, sedikitnya akan bergantung kepada (1) perilaku yang mendukung penerapan sistem itu baik dari kalangan pendidikan tinggi sendiri, maupun dari masyarakat secara keseluruhan, (2) adanya konsep akreditasi dan standardisasi yang jelas, layak dan operasional.

Dalam bab ini kedua persyaratan kondisional itu dan faktor-faktor lain yang berkaitan akan dicoba dibahas secara global dan diusahakan mengarahkannya kepada maksud-maksud yang bersifat implementatif.

1. Pembinaan Kesadaran Mutu Pendidikan

Hasil penelitian telah memberikan petunjuk bahwa kesadaran terhadap mutu pendidikan (akademis) pada sebagian besar para pemimpin pendidikan tinggi masih kurang. Terlepas dari persoalan standar atau kriteria apa yang dipakai, kesadaran akan mutu (bahwa mutu akademis dari sebahagian besar perguruan tinggi kita masih rendah) perlu ditingkatkan. Tanpa ada kesadaran yang demikian kita akan menjadi cepat puas diri, merasa bahwa kita sudah mencapai sebahagian besar apa-apa yang sesungguhnya masih belum diperdapat.

Menyadari mutu pendidikan berarti memberikan perhatian kepadanya dan mengkaji permasalahannya. De-

ngan adanya perhatian yang terus-menerus kepadanya, kita akan terdorong untuk berpikir mencari jalan ke luar dari permasalahan rendahnya mutu itu. Mungkin di beberapa perguruan tinggi atau bagian perguruan tinggi, mutu itu memang sudah cukup tinggi. Akan tetapi mereka yang berada di situ jangan sampai menutup mata terhadap kerendahan mutu yang ada di sekitarnya. Mereka juga harus tergugah untuk memberikan andil kepada pembinaan mutu yang masih rendah di tempat lain itu, baik dalam bentuk sumbangan informasi pemikiran ataupun pengalaman. Dalam hal ini bukannya pemerataan mutu yang harus dikembangkan melainkan pemerataan perhatian atau kesadaran terhadapnya yang perlu diratakan. Meratakan mutu berarti menurunkan mutu yang sudah tinggi dengan maksud menaikkan mutu yang rendah. Ini bukan cara yang tepat. Mutu tidak harus diratakan, akan tetapi ditingkatkan sehingga menjadi sama atau sedikitnya mendekati kepada yang tertinggi atau standar. Yang harus ditempuh bukan dengan penurunan atau pengurangan standar yang sudah ditetapkan melainkan memberikan perhatian yang lebih besar kepada mereka yang masih jauh di bawah standar.

Mutu sesuatu perguruan tinggi pada hakikatnya adalah fungsi dari mutu komponen-komponennya. Menyadari mutu, tidak dapat tidak akan mendorong timbulnya kesadaran akan kondisi dan situasi komponen-komponen sistem perguruan tinggi tersebut. Mereka yang kreatif akan tergugah untuk tidak hanya sekedar mengeluh atas kondisi yang tidak mengembirakan. Mereka akan mencoba mempelajari di mana letak

kekurangan dan kekuatan yang ada pada komponen-komponen itu. Mereka akan mencari cara-cara untuk memperbaiki mana - mana yang tidak baik, menyempurnakan apa-apa yang belum sempurna.

Baik dengan mengusahakan sendiri, maupun dengan orang lain sehingga secara bersama dapat meningkatkannya. Apabila dalam dunia perguruan tinggi di mana hasil yang dicapai pada umumnya adalah hasil kerjasama bukan hasil perorangan. Tidak ada seorang dosen yang dapat menepuk dada bahwa seorang sarjana yang dihasilkan oleh perguruan tingginya adalah sepenuhnya karena usaha dari dirinya sendiri. Sungguhpun demikian, sumbangan dari usahanya, betapa pun kecilnya, tetap mempunyai arti yang penting, karena tanpa dia ikut mungkin calon sarjana itu tidak akan menjadi sarjana. Fakta menunjukkan, betapa banyak mahasiswa yang terhambat penyelesaian studinya karena satu atau dua dosen tidak berpartisipasi secara penuh. Apalagi jika dosen (-dosen) tidak berpartisipasi sama sekali untuk meningkatkan mutu pendidikan. Seorang saja yang tidak menyadari di antara sekian banyak yang sadar sudah cukup menyulitkan bagi usaha-usaha perbaikan apalagi jika jumlah mereka yang tidak memperdulikan masalah mutu itu lebih besar.

Menjawab tantangan dari permasalahan mutu yang rendah, sesungguhnya merupakan usaha yang paling strategis, sebab jawaban itu akan melibatkan banyak usaha-usaha lain yang bersifat menunjang. Seperti yang sudah disinggung mutu akademis tidak lain daripada fungsi mutu unsur - unsur

yang terlibat dalam kegiatan akademis itu. Unsur kurikulum dosen, mahasiswa, peralatan dan perlengkapan, metoda dan teknik belajar-mengajar, suasana lingkungan, iklim hubungan dosen-mahasiswa dan sebagainya. Mutu dari unsur - unsur ini yang oleh Troutt (1979, h.203) disebut sebagai "the quality of the assembly line" (mutu garis perakitan) berhubungan langsung dengan "the quality of product" (mutu lulusan).

Membangkitkan kesadaran mutu sekaligus berarti menumbuhkan kesediaan untuk melakukan introspeksi dan kesediaan untuk dinilai, baik terhadap institusi maupun terhadap atribut-atribut pada diri sendiri. Sebenarnya masalah inilah yang terberat untuk dilakukan oleh mereka yang mempunyai pengertian keliru terhadap arti evaluasi atau penilaian dalam rangka akreditasi. Mereka keliru karena menganggap dengan penilaian itu akan membuka kedok kelemahan dan kekurangan yang selama ini tetap tersembunyi. Jika dibuka akan menurunkan gengsi yang sudah terlanjur tinggi sebelumnya. Akan tetapi dengan membiarkan hal ini berlarut-larut, kita sebenarnya membiarkan mereka itu menipu diri sendiri dan orang lain yang tidak mengerti, terutama para mahasiswa. Kita membiarkan mereka tenggelam dalam alam ketidaknyataan, alam pura-pura.

Walaupun kemudian (barangkali diketahui juga secara intuitif bahwa mereka itu sebenarnya tidak bermutu namun sudah terlambat, karena mereka sudah sempat memberikan pengaruh kepada anak didiknya. Dan kita tidak mempunyai me-

kanisme untuk menilainya secara beralasan. Sistem akreditasi yang bertolak dari adanya kesadaran mutu, merupakan mekanisme yang dapat dipercaya untuk membantu aparat pendidikan tinggi mengenal dirinya, lembaganya dan sekaligus masyarakatnya. Tanpa pengonalan diri sendiri tidak mungkin kenyataan yang sebenarnya dapat dikenali, karena "the true reality, however, according to Socrates, is one's own self" (Sikun Pribadi, 1971) (a), vol.II, h. 38). Oleh karena itu Socrates selalu mengumandangkan motto kebijaksanaannya "Know your self" (Menalilah diri Anda) sebagai langkah pertama dan utama untuk mengenal yang bukan diri sendiri, walau tahu segala-galanya, menurut Socrates, namun sebenarnya tidak tahu apa-apa.

Dunia pendidikan tinggi kadang-kadang memang penuh dengan kenyataan-kenyataan yang ironis sebab seperti dikatakan oleh Ashby yang dikutip oleh Kerr (McCaig, 1973, h.145): "Although dedicated to pursuit of knowledge, they have until recently resolutely declined to pursue knowledge about themselves" (Kendatipun berdedikasi untuk mengejar ilmu pengetahuan, akan tetapi sampai dengan akhir-akhir ini mereka secara pesat mundur dalam mengejar pengetahuan tentang diri mereka sendiri).

Kita banyak memperhatikan kelemahan di luar diri kita, namun sedikit mengindahkan kekurangan kita sendiri. Sudah tiba saatnya untuk mengoreksi keadaan yang ironis tersebut dengan jalan membina kesadaran atas mutu pendidikan yaitu dengan jalan menerapkan sistem akreditasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa sendiri.

Agaknya, bukan suatu kebetulan, apabila Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, baru-baru ini telah pula melontarkan kesan penilaiannya bahwa pada saat ini baik dalam masyarakat pada umumnya, pemimpin perguruan tinggi khususnya terlihat gejala "kurang pendapat mengenai mutu hasil pendidikan tinggi (Pikiran Rakyat, 25 September 1979). Kesan Menteri itu dapat dipandang sebagai cermin dari kurangnya kesadaran itu pada masyarakat. Kiranya pendapat Menteri P dan K ini dapat pula dijadikan pangkal tolak penerapan sistem akreditasi tersebut, sebab hanya dengan penerapan sistem itu kita benar-benar akan menyadari bahwa mutu pendidikan kita masih rendah. Dalam hubungan ini terdapat semacam siklus yang berputar seperti lingkaran setan. Untuk penerapan sistem akreditasi diperlukan kesadaran mutu, dan untuk pembinaan kesadaran mutu diperlukan sistem akreditasi. Supaya lingkaran itu dapat diputuskan sebaiknya disepakati saja secara bersama, seperti yang dihasilkan penelitian ini, satu anggapan bahwa kesadaran mutu pendidikan tinggi kita memang masih rendah.

Di samping itu, baik secara makro maupun mikro, semua usaha-usaha yang dimaksudkan untuk meningkatkan mutu, informasinya disebarluaskan. Ceramah-ceramah, ulasan-ulasan dan komentar-komentar tentang mutu yang rendah sering diberikan, kepada para pembina pendidikan. Begitu pula dengan penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan masalah mutu tersebut.

Kesadaran mutu ini dapat juga ditingkatkan dengan mengadakan kunjungan-kunjungan ke perguruan tinggi yang sudah tinggi mutunya.

2. Pembinaan kesadaran akan perlunya pengawasan

Kesadaran akan mutu saja tidak cukup, sebab belum memberikan jaminan bahwa mutu akan dipertahankan. Hasil penelitian lapangan memperlihatkan bahwa kesadaran mutu boleh dikatakan tidak memberikan kontribusi kepada kesadaran akan perlunya pengawasan atas mutu dan usaha-usaha peningkatan serta pemeliharannya.

Pengawasan akademis tidaklah diartikan secara sempit seperti yang biasa dipelajari dalam teori-teori tentang supervisi, inspeksi dan pengontrolan yang mengimplikasikan adanya sesuatu badan atau orang lain yang melakukan pengawasan dengan perkataan lain pengawasan dari luar diri atau institusi sendiri. Pengawasan yang promovendus maksudkan ialah dalam arti yang luas, seperti yang terkandung makna perkataan asalnya "awas."

W.J.Poerwadarminta (1976) menjelaskan arti awas sebagai (1) dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan; (2) tajam tilikan, (3) tidak meling (tidak lengah atau lalai), waspada dan (4) hati-hati, ingat-ingat. Dalam arti yang luas, pengawasan itu tidak selalu harus datangnya dari luar atau yang bersifat eksternal. Pengawasan adalah juga bersifat internal, bahkan sifatnya yang tersebut belakangan ini lebih penting, sebab apabila setiap orang atau instansi telah memiliki pengawasan internal secara efektif, maka pengawasan eksternal itu sesungguhnya tidak diperlukan. Pengawasan eksternal harus dianggap sebagai hal yang bersifat sementara atau insidental, yang "terpaksa" dilakukan selama pengawasan internal belum

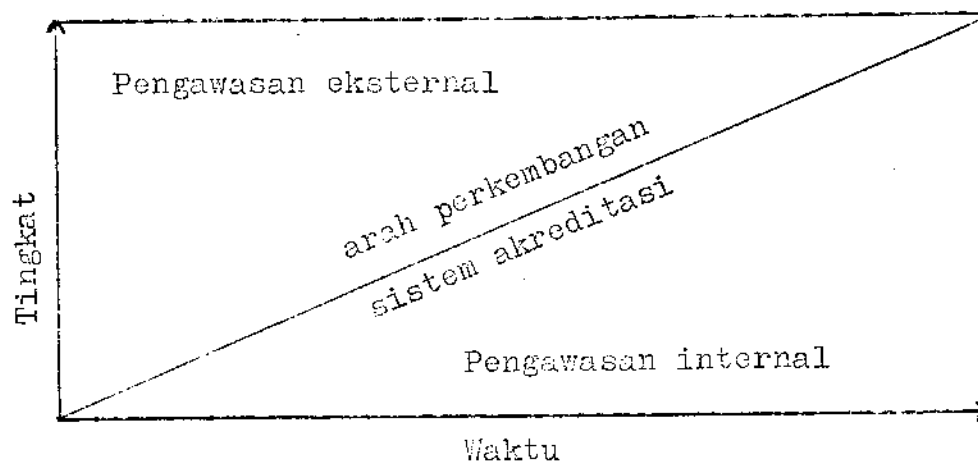
tumbuh atau berkembang secara "sempurna."

Pengawasan internal, adalah suatu bentuk pengawasan yang muncul atas dasar kesadaran atas tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat dan Tuhan. Tanggung jawab yang melambangkan keutuhan serta perujudan pribadi yang produktif. Tanggung jawab yang berpedoman kepada norma-norma etis manusiawi (Fromm, 1947), tanggung jawab yang lahir karena kesehatan mental (Sikun Pribadi, 1971, (b)), atau seperti yang disebut oleh Kohnstamm sebagai perujudan kata hati (Sikun Pribadi, 1971 (a)).

Kedua macam pengawasan ini jangan dipandang sebagai dua hal yang antagonis atau kontradiktif melainkan sebagai substitutif. Pengawasan eksternal berperan sebagai pengganti yang internal selama ia belum berfungsi dan terpasang secara kuat. Hubungan antara keduanya bersifat berkebalikan. Pengawasan eksternal berada pada taraf maksimal di kala pengawasan internal masih minimal. Sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan pengawasan internal yang semakin lama semakin kuat, pengawasan eksternal secara berangsur-angsur juga harus berkurang atau dikurangi. Secara grafis hubungan antara keduanya itu dapat dilukiskan seperti gambar halaman berikut.

Pengawasan internal pada hakikatnya adalah pengawasan yang terpasang dalam diri sendiri. Norma-norma yang menjadi sandarannya tidak lagi berada di luar atau asing bagi dirinya, melainkan telah terinternalisasikan, terpadu atau bersarang dalam hati nurani sendiri. Manusia atau institusi yang demikian menunaikan kewajiban dan bertanggung

GAMBAR 18
HUBUNGAN ANTARA PENGAWASAN EKSTERNAL DAN
INTERNAL



gung jawab bukan karena sesuatu kekuatan apalagi paksaan yang ada di luar dirinya, melainkan karena keyakinan atau dorongan dari batinnya atau dirinya sendiri. Perilaku yang diawasi secara internal adalah perilaku yang sesuai dengan suara hati manusia secara hakiki, suara hati yang diterangi oleh Nur Illahi (Sikun Pribadi 1972). Perilaku demikian bersumber dari kebersihan mental, ketulusan budi, kejernihan pikiran yang dapat sinar dan rahmat Tuhan seperti dikatakan oleh Driyarkara (1966, h. 42)

Berkat sinar cahaya dari Tuhan, demikianlah kita Agustinus dalam menganalisa suara batin, maka manusia dengan berpikir, dapat menunjukkan petunjuk jalan untuk diri sendiri. Dengan demikian maka jalan itu bersumberkan Tuhan sendiri, Pencipta yang abadi.

Pengawasan internal, dalam pengertian eksistensi manusiawi, tidak lain daripada norma-norma tanggung jawab yang "bersumber kepada keputusan kata-hati" (Sikun Pribadi, 1972, h. 55) dengan ciri-cirinya, menurut Kohnstamm :

- a) mempertaruhkan seluruh kepribadian
- b) irrasional atau super-rasional, karena motivasi-nya yang tak dapat dianalisa menurut jalan pikiran (rasional)
- c) konkrit, individual dan unik, karena sifatnya yang tidak muncul secara berulang-ulang (bukan hanya sekedar pelaksanaan sesuatu aturan yang umum)
- d) bersifat intuitif yang merupakan karunia Illahi.

Jelaslah bahwa masalah pengawasan sesungguhnya adalah masalah etika, masalah moral atau kesusilaan dan pertanggungjawaban. Mendidik adalah usaha yang bertanggung jawab, karena harus dilakukan secara sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan diri manusia seutuhnya (GBHN, 1973). Dengan berlandaskan Pancasila, secara nasional pendidikan itu terarah kepada peningkatan :

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa (GBHN, 1978).

Dalam garis-garis Besar Haluan Negara (1978) pengarahannya pengembangan dan pemberian peranan kepada Perguruan Tinggi secara khusus ditegaskan.

- 1) Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai pusat pemeliharaan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan kebutuhan pembangunan masa sekarang dan masa mendatang,
- 2) Mendidik mahasiswa-mahasiswa agar berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Bangsa dan Negara Indonesia.

- 3) Menggiatkan mahasiswa sehingga bermanfaat bagi usaha-usaha pembangunan nasional dan pembangunan daerah,
- 4) Mengembangkan tata kehidupan kampus yang memadai dan tempok jelas corak khas kepribadian Indonesia.

Arah-orah yang demikian, adalah juga kategori-kategori pengawasan secara internal yang dapat dituangkan ke dalam pedoman-pedoman operasional yang lebih terperinci dan mudah dievaluasi.

Membina kesadaran akan perlunya pengawasan sama dengan membina kesadaran akan perlunya pertanggungjawaban, karena itu adalah langkah yang mutlak diperlukan sebagai prasyarat bagi pembinaan mutu sistem akreditasi di Indonesia. Setiap anggota perguruan tinggi harus mempunyai kesadaran untuk diawasi dan mengawasi baik secara eksternal maupun internal dengan pengertian yang eksternal hanya sebagai "substitusi" bagi yang internal. Semakin terbina kemampuan untuk mengawasi diri sendiri secara internal semakin dikurangi yang eksternal sehingga akhirnya pengawasan eksternal itu hanya berperan sebagai validasi atau verifikasi bagi pengawasan internal.

Kesadaran akan perlunya pengawasan dapat dibina, seperti juga halnya dengan kesadaran akan mutu, melalui penyebarluasan informasi tentang sistem pengawasan mutu sekarang ini yang masih acak-acakan. Yang dimaksudkan dengan pembinaan pengawasan ialah pembinaan yang lebih banyak diarahkan kepada mekanisme pertanggungjawaban moral

kaum inteligensi, kaum pendidik dan para penanggung jawab lembaga pendidikan. Ceramah-ceramah mengenai etika, filsafat menelaah dan pendidikan mestinya lebih banyak dibagikan kepada para pendidik kita sendiri. Secara terang-terang dikemukakan bahwa sebagian besar dosen-dosen kita belum banyak tahu mengenai filsafat pendidikan yang lebih menekankan kepada pembentukan kata hati. Agak berbeda dengan guru-guru di sekolah menengah dan dasar yang sebahagian mendapat kuliah-kuliah ilmu pendidikan (termasuk falsafah pendidikan), para guru di perguruan tinggi justru kurang mendapatkan pengetahuan yang demikian. Mereka diangkat karena telah memenuhi syarat-syarat formal sebagai pegawai negeri yang berstatus tenaga pengajar saja.

Barangkali ada baiknya, sebelum seseorang diangkat sebagai dosen ditatar dulu dalam ilmu-ilmu atau falsafah pendidikan yang dapat menumbuhkan kesadaran tanggung jawab dalam arti yang luas. Atau setidaknya mereka dianjurkan membaca literatur yang berisikan masalah tersebut.

Sikap dan penghargaan pemimpin terhadap masalah pengawasan dapat pula menumbuhkan dan membina kesadaran itu pada aparat-aparat bawahannya.

3. Pembinaan kesadaran akan pentingnya sistem akreditasi

Bila kesadaran mutu dan kesadaran pengawasan telah dipikirkan pembinaannya, maka kesadaran akan pentingnya akreditasi sebagai sistem pengawasan mutu itu harus pula dipikirkan. Ketiga macam kesadaran ini seperti yang di-

perlihatkan oleh hasil penelitian, ternyata berdiri sendiri-sendiri, bebas dari pengaruh antara satu dengan lainnya (hubungan fungsional linier dengan koefisien arah yang tidak berarti, begitu pula dengan keutuhan atau kebulatannya yang belum signifikan);

Kesadaran akan pentingnya sistem akreditasi ditandai oleh adanya pengetahuan dan minat atau perhatian kepadanya. Akreditasi adalah suatu sistem pemberian pengakuan atas telah terpenuhinya persyaratan-persyaratan atau tercapainya standar-standar tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti yang telah dikemukakan dalam motto pada bab ini, akreditasi tidak dimaksudkan untuk digunakan bagi tujuan-tujuan selain daripada maksud penilaian dan peningkatan mutu pendidikan. Sistem itu memberi ruang gerak yang luas bagi pembinaan diri secara berencana, terpadu dan menyeluruh. Karena itu perencanaan akademis dan akreditasi dapat diucapkan dalam satu nafas dan satu irama karena akreditasi tidak dapat dilakukan tanpa didahului oleh perencanaan, sebaliknya perencanaan akademis akan lebih mudah diawasi pelaksanaannya jika dikerjakan dalam rangka akreditasi.

Menyadari pentingnya akreditasi berarti menyadari, bahwa dalam setiap institusi terdapat dua unsur yang perlu diperhatikan pengembangan dan pembinaannya, yaitu (1) institusi secara keseluruhan, dan (2) program pendidikan secara khusus. Akreditasi yang dilakukan terhadap institusi bersifat umum atas dasar pemenuhan syarat-syarat administratif dan yuridis formal. Sedangkan akreditasi terha-

dap program yang didasarkan atas terpenuhinya persyaratan akademis, pedagogis dan ilmiah dilakukan setelah akreditasi institusional dilakukan.

Kedua jenis akreditasi ini sungguhpun berbeda, namun tidak terpisah sebab kedua-duanya sama-sama diperlukan dan satu sama lain saling memerlukan. Membina kesadaran akreditasi berarti menggugah semua aparat pendidikan tinggi tidak boleh berpuas diri apabila institusi mereka telah mendapat pengakuan sebagai suatu perguruan tinggi negeri oleh pemerintah, walaupun pengakuan itu "terpaksa" diberikan karena tekanan-tekanan kekuatan politis belaka. Seperti diketahui, hampir sebahagian besar perguruan tinggi negeri di Indonesia didirikan pada penggal waktu antara tahun 1955-1965 di mana orientasi politik mendominasi semua aspek kegiatan pemerintahan dan masyarakat. Presiden Sukarno sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan (1945-1967) yang lebih mementingkan peranan perguruan tinggi sebagai kekuatan politik yang dapat mempersatukan bangsa, menyetujui pendirian, (sedikitnya sebuah) perguruan tinggi negeri di setiap propinsi.

Sukarno had had to fight for years against the Dutch and the separationists among his own people, particularly in Maluku, Sulawesi and Sumatra (1958: PRRI in Sumatra, PERMESTA in Northern Sulawesi) for the countries unity. These factions amongst his own ranks were still far from being overcome. Therefore, one had to demonstrate that the Republic was willing to give the Provinces their own rights instead of concentrating everything on Djawa, as the Dutch had done (Junge, 1973, h.29). (Sukarno telah berjuang selama bertahun-tahun melawan Belanda dan kaum separatis di kalangan rakyatnya sendiri, khususnya di Maluku, Sulawesi dan Sumatra (1958 PRRI di Sumatera, PERMESTA di Sulawesi Utara) demi kesatuan negara. Perpecahan di kalangan perwira - perwiranya masih belum tertanggulangi secara tuntas.

Oleh karena itu ia harus menunjukkan bahwa Pemerintah Republik bertekad untuk memberikan hak-hak sendiri kepada Propinsi-propinsi daripada memusatkan segala sesuatunya di Jawa seperti yang dilakukan oleh pemerintah Belanda).

Dari sudut pandangan politik, adanya perguruan tinggi negeri pada setiap propinsi memang merupakan kebijaksanaan yang tepat karena perguruan tinggi-perguruan tinggi itu dapat menjadi alat pemersatu dan penguat loyalitas kepada pemerintah pusat seperti yang diungkapkan oleh Solo Soemardjan (1973, h. 44):

It is therefore understandable that local, but state financed and state managed, universities constitute an effective instrument to generate and maintain a sense of loyalty of the central government and in that way also exercise a unifying effect in the great diversity of ethnic groups in the 13.000 islands in the country". (Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa perguruan tinggi-perguruan tinggi lokal, tetapi dibiayai dan diurus oleh negara, merupakan alat yang ampuh untuk mengarahkan dan memelihara suatu perasaan loyalitas kepada pemerintah pusat, dan dengan cara itu menguatkan pengaruh penyatuan kelompok-kelompok etnis yang sangat berbeda dari 13.000 kepulauan di negeri ini).

Sebagai akibat dari tekanan dan tuntutan kebutuhan politis itu maka tidak mengherankan apabila pendirian perguruan tinggi negeri itu lebih banyak memperhatikan persyaratan-persyaratan administratif dan yuridis formal (legalitas) dari persyaratan (kualifikasi) akademis dan ilmiah. Haruskah hal itu dibiarkan terus? Haruskah kita untuk selamanya mengorbankan kepentingan kualitas itu demi tujuan-tujuan politik yang secara temporer telah terpenuhi? Apakah dengan menggalakkan persyaratan - persyaratan akademis itu sekarang ini akan menghilangkan efek positif politis yang telah dipunyai perguruan tinggi selama

ini? Apakah dengan tidak lagi membiarkan perhatian yang lemah terhadap tuntutan-tuntutan kualitas akademis itu justru kita akan lebih memperbesar pengaruh positif kepada aspek-aspek politik, sosial dan budaya pada jangka waktu yang lebih panjang?

Promovendus berpendapat bahwa membina kesadaran akreditasi akan lebih menguntungkan dunia pendidikan tinggi kita, sebab akreditasi itu merupakan proses evaluasi yang dibimbing oleh kriteria nyata perencanaan yang layak, terarah dan terpadu dalam satu sistem pembinaan kecerdasan bangsa secara menyeluruh. Melalui proses pengakreditasi integritas dan mutu pendidikan perguruan tinggi diberi jaminan, sehingga masyarakat mendapat kepastian yang lebih besar untuk mempertaruhkan nasib pendidikan anak-anak atau diri mereka sendiri.

Kesadaran akan pentingnya akreditasi berarti pula kesadaran atas implikasinya terhadap masyarakat dalam arti implikasi sosial kultural. Sistem akreditasi mengharagai dan menghendaki adanya ketertiban, keteraturan dan keterbukaan. Semuanya harus jelas, tidak ada yang bersifat tersembunyi, karena pikiran yang melandasinya adalah kenyataan-kenyataan yang ada. Dan kita harus berani **menghadapi kenyataan** itu betapapun pahitnya. Adalah lebih baik kita tumbuh dan berkembang dari keadaan yang tidak menyenangkan kepada yang menyenangkan daripada sebaliknya.

4. Membina pengertian terhadap akreditasi

Membina ketiga macam kesadaran tersebut terdahulu secara simultan pada hakekatnya merupakan pembinaan pengertian tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sisten akreditasi. Kita mengerti akreditasi karena kita sadar bahwa ada sesuatu sistem pemberian pengakuan kepada institusi atau program pendidikan. Sistem itu adalah sistem pengawasan. Yang diawasi adalah mutu pendidikan.

Pengertian tentang akreditasi yang disingkat dengan istilah pengertian keakreditasian adalah suatu struktur kognitif yang tarafnya lebih tinggi dari hanya sekedar menyadari. Tanpa didukung oleh kesadaran mutu dan kesadaran pengawasan, kita dapat saja mempunyai kesadaran akreditasi dalam arti kita tahu dan mengenal sistem itu sebagai suatu cabang pengetahuan atau sebagai fakta pengalaman di sesuatu tempat tertentu.

Akan tetapi, jika kita menyatukan kesadaran akreditasi itu dengan kesadaran-kesadaran mutu dan pengawasan, struktur kognitifnya sudah berlainan. Kita tidak lagi sekedar tahu atau mengenal akan tetapi akan mengerti, memahami, memikirkan masalahnya dan mencari jalan pemecahannya. Kita melihatnya dalam satu totalitas yang lebih besar yaitu keseluruhan sistem pendidikan kita dalam suatu konteks sosial budaya yang lebih luas. Dengan pengertian itu kita akhirnya mempunyai visi atau tinjauan tertentu yang dapat dikaitkan dengan apresiasi atau penilaian atasnya.

Kita mencari kebaikan-kebaikan serta kelemahan-kelemahan yang terdapat padanya baik masih dalam kaitan dengan pola-pola kebudayaan atau latar belakang kemasyarakatan di tempat asalnya, maupun setelah dilepaskan dari kaitan itu. Dengan sendirinya tingkat pengertian itu dapat berbeda (tidak sama) pada setiap orang, bergantung kepada tingkat kesadarannya terhadap ketiga unsur terdahulu. Namun unsur kesadaran terhadap pentingnya akreditasi, seperti yang diperlihatkan oleh hasil penelitian, ternyata mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi terbentuknya pengertian keakreditasi.

Baik terhadap kesadaran akreditasi maupun terhadap pengertian keakreditasi peranan informasi sangat penting sehingga pembinaan pengertian itu dapat diandalkan kepada kekuatan dukungan sumber-sumber informasi dengan kadar muatan keakreditasi yang tinggi. Penelitian lapangan juga memperlihatkan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara kemengertian akreditasi dengan jabatan administratif di mana jabatan Rektor dan Pembantu Rektor lebih dominan. Seperti diketahui kedua jabatan itu memungkinkan pejabatnya lebih banyak berhubungan dengan masyarakat di luar perguruan tingginya sendiri, dan lebih banyak berkomunikasi dengan sesama perguruan tinggi dalam negeri ataupun luar negeri.

Tukar-menukar informasi biasanya jauh lebih banyak terjadi pada tingkat perguruan tinggi dibandingkan dengan pertukaran pada tingkat fakultas atau jurusan.

Dengan terungkapnya bahwa pengaruh dan peranan informasi sangat besar bagi pembentukan pengertian keakreditasi, jelaslah bahwa langkah pertama dan utama yang harus diambil dalam usaha penerapan sistem akreditasi itu ialah :

- 1) mengadakan dan membina sumber-sumber informasi mengenai akreditasi khususnya, kondisi sistem pendidikan tinggi pada umumnya, termasuk pengadaan media komunikasi sepanjang hal itu masih belum ada sampai saat ini;
- 2) memanfaatkan semua media komunikasi yang dapat mencapai segenap perguruan tinggi di Indonesia sebagai media penyampaian (komunikasi timbel-balik) informasi, ide, persoalan atau permasalahan yang berkaitan dengan sistem akreditasi tersebut;
- 3) memanfaatkan setiap forum pertemuan antar perguruan tinggi untuk membahas, mendiskusikan, dan mengkaji berbagai masalah yang berkenaan dengan penerapan sistem tersebut;
- 4) melakukan berbagai penelitian yang ada kaitannya dengan penerapan sistem itu serta menyebarluaskan hasil-hasilnya ke segenap perguruan tinggi guna meningkatkan pengertian yang telah ada.
- 5) mengadakan forum pembinaan khusus seperti penataran, lokakarya, ceramah-ceramah dan sebagainya.
- 6) memanfaatkan para pemimpin dan staf edukatif yang sudah mengerti sistem akreditasi untuk memberikan penger-

tian kepada rekan-rekan yang belum mengerti, misalnya dengan program-program diskusi, penataran khusus, atau kelompok-kelompok studi, dan sebagainya.

Bahwa pembinaan pengertian keakreditasi ini harus menempati kedudukan yang sentral, tiada lain alasan -nya kecuali adanya petunjuk dari hasil penelitian yang memperlihatkan terdapatnya perbedaan yang sangat berarti antara jumlah faktual mereka yang mengerti itu dengan jumlah teoritis yang diperlukan bagi keberhasilan sesuatu inovasi. Di samping itu terdapat pula pertanda yang kuat bahwa variabel pengertian berkorelasi secara positif dengan variabel sikap serta kemauan untuk berakreditasi. Dalam rangka keinovasian sistem akreditasi, kekurangan pada perilaku yang mendukung, justeru terletak dalam kekuatan kelompok mayoritas dini, mayoritas ikutan, dan kelebihan pada calon-calon pengikut kesiangan. Mengintensifkan pembinaan pengertian akan memberikan pengaruh kepada :

- 1) bertambahnya jumlah mayoritas dini dan mayoritas ikutan;
- 2) mengurangi jumlah calon-calon pengikut kesiangan;
- 3) memperbesar sikap positif terhadap sistem akreditasi;
- 4) meningkatkan kemauan (motivasi) untuk berakreditasi;
- 5) akan mendorong munculnya suatu lapangan studi baru (khusus) yaitu administrasi perguruan tinggi dengan segala aspek dan implikasinya.

Pembinaan pengertian keakreditasi, tentunya tidak hanya terbatas kepada kalangan pemimpin pendidikan tinggi, akan tetapi harus juga meliputi seluruh sivitas akademika perguruan tinggi terutama para pengajar (tenaga edukatif)nya. Bahkan lebih dari itu masyarakat juga harus diberikan pengertian sekurang-kurangnya diberi informasi yang memadai tentang makna dan tujuan sistem tersebut.

5. Pembinaan sikap dan kemauan

Walaupun pembinaan pengertian akan memberi kontribusi yang sangat berarti bagi pembinaan sikap yang positif dan kemauan yang kuat, tidaklah berarti usaha untuk membina keduanya itu hanya diandalkan kepada pembinaan pengertian saja. Memang tidak mudah menghadapi masalah sikap dan kemauan, karena keduanya itu menyangkut kondisi psikologis. Faktor-faktor dan variabel-variabel yang mempengaruhinya cukup banyak dan kadang-kadang sulit dideteksi, apalagi jika pendekatan itu hendak dilakukan secara cepat, tergesa-gesa dan asal (sembarang) saja.

Seperti yang sudah dikemukakan, baik sikap maupun kemauan dapat dibagi atas tiga kategori, masing-masing sikap positif, netral dan negatif; kemauan yang kuat tidak tentu, dan kemauan lemah. Dalam hubungannya dengan pembinaan, sudah jelas bahwa cara membina masing-masing kategori tidak akan sama. Terhadap sikap yang sudah positif dan kemauan yang kuat persoalannya ialah bagaimana kondisi itu dapat dipertahankan, bahkan jika mungkin ditingkatkan. Untuk kategori yang kedua, sikap netral dan kemau-

ar yang tidak tentu, masalahnya bagaimana harus mengubahnya sehingga menjadi sikap yang positif dan kemauan yang kuat. Sedangkan pada kategori ketiga masalahnya adalah yang terberat karena kondisi yang ada justru berlawanan dengan yang diinginkan. Perubahan yang diharapkan bukan hanya bersifat "pergeseran" melainkan penjungkirbalikan, dari keadaan (sikap) negatif harus menjadi positif, dari kemauan lemah harus menjadi kuat. Setidak-tidaknya diharapkan terjadi pergeseran dari negatif ke netral, dari yang lemah ke yang agak kuat, sehingga restriksi-restriksi yang mungkin timbul akibat sikap dan kemauan semula dapat berkurang.

Pembinaan sikap dan kemauan pada dasarnya menyangkut perubahan mental manusia yang bersifat umum dan khusus. Karena itu pendekatan yang harus dilakukan, di samping yang menyeluruh tentunya juga kasus demi kasus. Sebab-sebab dan latarbelakang mengapa orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu bersikap netral dan negatif, berkemauan lemah atau tidak menentu, harus dicari dan ditemukan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah-langkah perubahan yang dianggap perlu.

Dari sudut psikologis, sikap dan kemauan merupakan bagian dari kepribadian karena itu dapat dipandang sebagai pencerminan daripadanya. Terbentuknya sesuatu sikap atau kemauan berjalan bersamaan dengan terbentuknya kepribadian. Faktor-faktor psikologis dan latar belakang pengalaman hidup yang membentuk kepribadian adalah juga pembentuk sikap serta kemauan seseorang individu yang berbeda

secara kualitatif dengan lainnya, Sebagai bagian dari suatu kepribadian yang selalu dinamis (Fromm, 1947) sikap dan kemauan selalu dapat berubah, bahkan dapat pula dipercepat.

Beberapa teori tentang perubahan sikap dan kemauan yang dikemukakan oleh McGuire (Lindzey and Aronson, jilid III, 1969, h. 136-272) menguatkan anggapan bahwa perubahan sikap dapat dipercepat melalui pembinaan-pembinaan yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Secara umum teori-teori itu dapat digolongkan kepada salah-satu di antara empat kelompok besar pendekatan.

a. Pendekatan menurut teori belajar.

Menurut teori ini sikap individu berubah setelah melalui proses belajar, jika yang dipelajarinya memberikan keyakinan kepadanya (persuasif), maka sikapnya akan berubah menurut apa yang dipelajarinya. Pelajaran adalah mediator untuk perubahan sikap.

b. Pendekatan menurut teori perseptual

Menurut teori ini, perubahan sikap menurut persepsi yang dimiliki oleh individu. Oleh karena itu jika ingin mengubah perilakunya, persepsinya yang harus diubah terlebih dahulu.

c. Pendekatan berdasarkan teori konsistensi

Teori ini berasumsi bahwa sikap seseorang merupakan suatu tingkat keseimbangan internal yang harmonis antara sistem keyakinannya dengan perbuatan-perbuatan yang dapat diamati. Setiap perubahan bertolak da-

ri keadaan yang tidak konsisten antara apa-apa yang diketahuinya dengan yang dibuatnya. Perubahan akan terjadi pada saat individu itu mengkonsistenkan sikap dan keyakinannya. Jika teori belajar lebih menitikberatkan pada aspek logik, maka teori konsistensi pada segi psikologis secara menyeluruh.

d. Pendekatan menurut teori fungsional

Menurut teori ini, sikap individu berubah sesuai dengan obyek dan informasi tentang obyek yang ditujunya. Semakin kuat valensi obyek itu semakin cepat terjadinya perubahan sikap.

Dari teori-teori di atas dapat dijelaskan bahwa sikap dan kemauan memang selalu dapat berubah. Hanya saja tempo dan iramanya bisa jadi tidak sama pada setiap individu. Perbedaan-perbedaan itu tidak saja ditentukan oleh kondisi dan struktur kepribadian subyek akan tetapi juga oleh keadaan obyek yang menjadi sasaran sikap dan kemauan itu. Terhadap sesuatu obyek tertentu sikap dan kemauan seseorang mungkin lebih cepat berubah daripada terhadap obyek lainnya, begitu pula seseorang tertentu bila dibandingkan dengan yang lainnya.

Beberapa penelitian yang dilakukan terhadap resistensi individual ataupun kelompok yang terdapat pada berbagai perubahan sikap dan kemauan (Watson, 1969, hal.63) mengungkap bahwa "self-distrust, insecurity, regression and dependency on authority figures are also identified as conservative influences."

Bahwa pertalian antara subyek dengan obyek perubahan sikap dan kemauan itu memegang peranan amat penting dikemukakan oleh Dalin (1978, h.35) :

Generally, individuals and groups have few problems in changing their behaviour if they can see profit in it. 'Profit' may have many meanings. It may mean something which supports their values or their power in the system, or which helps them to fulfil old or new personal goals. What is important is that the individual can see a meaning for himself in being involved in the change effort. (Umumnya, individu dan kelompok mempunyai masalah-masalah dalam perubahan perilaku mereka jika dapat melihat keuntungan di dalamnya. 'Keuntungan' boleh jadi mempunyai banyak arti. Boleh jadi berarti suatu yang menopang nilai - nilai atau kekuatan mereka di dalam sistem atau yang menolong mereka mencapai tujuan-tujuan pribadi baik yang sudah lama maupun yang baru. Yang penting adalah bahwa individu itu dapat melihat sesuatu arti bagi dirinya pada keterlibatannya dalam usaha-usaha perubahan itu).

Ini mengandung makna bahwa usaha pembinaan sikap dan kemauan untuk berakreditasi, keberhasilannya akan banyak ditentukan oleh seberapa jauh sistem akreditasi itu dapat mempunyai arti positif kepada masing-masing individu. Sikap mereka yang negatif atau netral, kemauan yang lenah atau tidak menentu, atau bahkan tidak mempunyai kemauan sama sekali atau justru berkemauan untuk sebaliknya (menentang perubahan) itu, tentunya sebagian bertolak dari arti yang tidak positif yang dipradugakan mereka terhadap penerapan sistem akreditasi tersebut. Mungkin sekali mereka justru merasa terancam, atau tidak yakin bahwa sistem itu akan membawa kebaikan bagi diri mereka dan masyarakat sekitar mereka. Masalahnya bagaimana memberikan keyakinan itu kepada mereka. Tentunya yang sesuai pula dengan corak atau keragaman menjadi yakinnya mereka

itu; sebab, ada orang yang segera saja menjadi yakin setelah mengenal secara umum, ada yang setelah terperinci, bahkan ada yang harus menunggu dan melihat hasil nyata dari perubahan itu terlebih dahulu.

Penelitian lapangan memberikan petunjuk bahwa fakta kompetensi mempunyai pengaruh negatif terhadap pembentukan sikap keakreditasian. Semakin kompeten semakin tidak positif sikap mereka. Hasil ini kelihatannya agak aneh dan menyulitkan penyusunan konsep strategi pembinaan sikap terhadap akreditasi, sebab bila ditinjau sepiantas lalu akan memberikan arah kepada kesimpulan yang keliru yaitu untuk memperoleh sikap yang positif para pemimpin pendidikan tinggi harus semakin tidak dikompetenkan terlebih dahulu. Walaupun berbagai penafsiran dapat ditarik dari hasil penemuan itu akan tetapi promovendus mempunyai dugaan yang kuat bahwa mereka yang kompeten justru belum begitu yakin akan manfaat dari sistem akreditasi untuk peningkatan dan pemeliharaan mutu pendidikan. Mereka lebih percaya kemampuan diri mereka sendiri untuk meningkatkan mutu, dan merasa bahwa memang diri mereka telah bermutu, oleh karena itu dorongan dari luar (melalui akreditasi) tidak diperlukan. Jadi mereka keliru dalam memahami apa hakikat yang sebenarnya akreditasi itu. Agaknya mereka terlalu melihat aspek pengawasan eksternal yang terdapat pada sistem tersebut, sehingga jika sistem itu diterapkan di Indonesia mereka kuatir kalau-kalau sistem itu akan justru mengganggu kompetensi mereka.

Di samping itu pengertian kompetensi dan kriteria yang promovendus gunakan dalam penelitian ini masih perlu dipertanyakan dan dimantapkan atau diperbaiki di mana perlu. Sistem akreditasi adalah salah satu cara dan usaha untuk menjustifikasi kompetensi seseorang.

Hal yang serupa ditemukan pula pada hubungan fungsional antara pendidikan dengan sikap positif keakreditasi-an. Semakin tinggi pendidikan semakin tidak positif sikap mereka. Jelas di dalam hal ini mereka kurang yakin atas kemanfaatan atau yakin akan ketidakbermanfaatan sistem akreditasi tersebut. Kenyataan yang paradoksial ini perlu dijernihkan terlebih dahulu. Penjernihannya dapat dilakukan dalam rangka pembinaan sikap yang positif tersebut.

Faktor yang kuat dan positif hubungannya dengan kuatnya kemauan adalah faktor usia. Semakin tinggi usia semakin kuat kemauan untuk menerima akreditasi sebagai sistem pengawasan mutu akademis. Keadaan ini justru berkebalikan dengan hubungan antara pengertian keakreditasi-an dengan usia yang semakin lanjut usia justru semakin kurang pengertiannya. Padahal antara pengertian dan kemauan terdapat hubungan yang positif. Paradoks ini pun harus dijernihkan dulu melalui penelitian-penelitian lebih lanjut dalam rangka pembinaan kemauan yang kuat, walaupun tidak selamanya keadaan yang paradoks itu tidak bermanfaat. Lao Tse (Sikun Pribadi, 1971a, h.1) misalnya justru

menunjukkan "true words always seem paradoxical, but no other form of teaching can take its place." (Kata - kata yang benar selalu terlibat paradoksikal, akan tetapi tidak ada bentuk lain yang dapat memberikan tempat kepada pendidikan).

6. Pembinaan konsep sistem akreditasi

Pembinaan konsep sistem akreditasi merupakan syarat mutlak, jika sistem itu ingin diterapkan. Sejauh ini kita memang belum mempunyai suatu konsep yang cukup jelas dan tersebar luas. Terutama mengenai komponen-komponen apa yang harus dinilai, baik komponen institusional maupun yang menyangkut dengan program, siapa yang harus menilai bagaimana cara menilai, prosedur mana yang harus dilalui dan untuk apa hasil penilaian itu digunakan.

Seperti yang sudah disinggung terdahulu, dalam sejarah perkembangan pendidikan tinggi negeri di Indonesia, pernah ada (dicobakan) suatu usaha penataan perguruan tinggi yang mirip dengan sistem akreditasi. Penataan itu memperkenalkan konsep klasifikasi perguruan tinggi dalam tiga kategori: Pembina, Madya dan Muda. Untuk menggolongkan sesuatu perguruan tinggi (fakultas/jurusan) ke dalam salah satu kategori terlebih dahulu diadakan penilaian atas beberapa komponen antara lain :

1. Personil yang meliputi tenaga akademis dan non-akademis,
2. Struktur organisasi,

3. Kegiatan akademis khusus,
4. Bangunan,
5. Perpustakaan,
6. Rasio mahasiswa dengan dosen tetap,
7. Perlengkapan Laboratorium,
8. Perlengkapan Pengajaran.

Berdasarkan penilaian atas kedelapan komponen tersebut oleh Panitia-panitia Ahli Antar Fakultas sejenis, Direktur Jenderal Perguruan Tinggi (tahun 1967) menetapkan sejumlah fakultas, departemen dan jurusan pada beberapa universitas dan institut negeri sebagai Pembina, dengan ketentuan untuk penetapan bagi fakultas/departemen / jurusan menurut kategori lainnya akan ditetapkan kemudian (baik yang Negeri maupun Swasta). Ternyata usaha ini terhenti di tengah jalan sebab sampai saat ini tidak diketahui lagi bagaimana kelanjutannya.

Persoalan yang ingin diketengahkan sehubungan dengan usaha di atas, ialah apakah komponen-komponen yang dinilai itu sudah memadai untuk dijadikan indikator bagi keadaan bernutu tinggi atau rendahnya sesuatu perguruan tinggi, jika tujuan usaha itu memang dikehendaki demikian?

Untuk perbandingan, Kerr (McCaig, 1973, h.150-151) menginventarisasi komponen-komponen pokok yang dinilai, (oleh dosen, mahasiswa, yayasan dan pemerintah) dalam mengevaluasi sesuatu perguruan tinggi (terutama di Amerika

Serikat) adalah :

1. Kualitas dosen di tingkat sarjana dan pekerjaan mahasiswa tingkat sarjana
2. Jumlah ilmuwan (scientists) yang terkemuka (anggota dari National Academy of Sciences, and recipients of Nobel Prizes).
3. Jumlah ahli-ahli (scholars) yang terkemuka.
4. Persentase dosen yang bergelar Ph.D.
5. Jumlah buku di perpustakaan.
6. Jumlah dana dari yayasan-yayasan, instansi pemerintah federal yang diterima untuk penelitian
7. Besarnya hibah atau wakaf perorangan (swasta) dan sumbangan tahunan (terutama dari alumni).
8. Skor ujian masuk mahasiswa.
9. Jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa dari National Merit Scholarships dan hadiah - hadiah lainnya ketika memasuki perguruan tinggi, dan hadiah Woodrow Wilson dan National Science Foundation ketika lulus sarjana.
10. Persentase mahasiswa yang melanjutkan ke tingkat sarjana.
11. Persentase mahasiswa yang memperoleh gelar Doktor.
12. Tingkat kebebasan akademis yang diukur menurut standar American Association of University Professors, dan menurut standar (yang agak lebih "rendah") American Civil Liberties Union.

Setiap perguruan tinggi berusaha secara intensif untuk mendapat skor yang tinggi pada komponen-komponen di atas, sebab dengan skor yang tinggi itu mutu mereka akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Menurut Kerr, di beberapa perguruan tinggi (antara lain University of California) komponen itu ditambah dengan angka putus kuliah sebagai salah satu indikator lagi. Asumsinya, semakin baik mutu sesuatu perguruan tinggi semakin kecil angka putus kuliahnya.

Komponen-komponen yang dinilai dalam rangka akreditasi, seperti yang dijadikan pedoman oleh North Central Association of Colleges and Secondary Schools (1970) adalah seperti berikut :

1. Tugas kependidikan institusi
2. Sumber daya yang menunjang tugas kependidikan
3. Organisasi institusi yang menunjang tugas kependidikan
4. Jenis dan kualitas program-program pendidikan
5. Kebijaksanaan dan pelaksanaannya (yang menunjang semangat mengajar yang tinggi)
6. Kehidupan mahasiswa di kampus
7. Prestasi mahasiswa (menurut ukuran tujuan perguruan tinggi).

Walaupun terdapat kesamaan dalam komponen-komponen dasar yang dinilai, namun setiap badan akreditasi mempunyai keunikan-keunikan sendiri dalam menentukan kriteria

penilaian. Kriteria dan standar yang dijadikan ukuran disusun bersama oleh mereka (institusi-institusi) yang telah menjadi anggota.

Willey dan Branch (1968) telah menyusun suatu petunjuk pelaksanaan swakaji bagi universitas-universitas di India. Dalam petunjuk itu mereka menyebut komponen-komponen yang harus dikaji dan dievaluasi pada dasarnya hanya dua komponen utama (1) Perumusan Tujuan (Tugas Kependidikan) dan (2) Sumber-sumber daya dan fungsi-fungsinya, yang berhubungan dengan pencapaian tujuan tersebut. Komponen pokok yang kedua ini diperincinya dalam beberapa komponen :

1. Organisasi dan Administrasi
2. Program Pendidikan dan pengajaran
3. Sumber-sumber dan penggunaan dana
4. Tenaga pengajar
5. Perpustakaan
6. Mahasiswa
7. Penelitian dan pendidikan pasca sarjana
8. Bangunan dan pekarangan
9. Program dan kegiatan khusus yang berkaitan dengan kemasyarakatan.

Bertolak dari beberapa perbandingan yang telah dikemukakan itu, promovendus berpendapat dalam pembinaan sistem akreditasi di Indonesia, komponen-komponen yang dinilai itu harus terdiri dari :

- a. Komponen masukan :
 - a.1 Masukan fundamental
 - a.2 Masukan mentah
 - a.3 Masukan instrumental
- b. Komponen proses :
 - b.1 Proses pendidikan (akademis)
 - b.2 Proses penelitian
 - b.3 Proses pengabdian kepada masyarakat
 - b.4 Proses manajerial.
- c. Komponen keluaran :
 - c.1 Keluaran pendidikan
 - c.2 Keluaran penelitian
 - c.3 Keluaran pengabdian kepada masyarakat
 - c.4 Keluaran sisa (putus kuliah, pengulang).

Komponen-komponen di atas dapat dijabarkan ke dalam kriteria evaluasi secara garis besarnya sebagai berikut :

- A. Komponen masukan :
 - A.1 Masukan fundamental :
 - A.1.1 Bagaimana perguruan tinggi itu menyusun fundamen-fundamel operasionalnya sehingga tergambar dengan jelas :
 - a) transformasi tujuan pendidikan nasional ke dalam tujuan kependidikan institusional.

- b) kriteria kualitatif kependidikan yang hendak dicapai oleh masing-masing program.
- c) kemudahan (fasilitas) kependidikan yang mendukung pengembangan diri mahasiswa sesuai dengan tujuan pendidikan.

A.1.2 Bagaimana perguruan tinggi itu menyusun perencanaan akademis jangka panjang, menengah dan jangka pendek, sehingga terlihat :

- a) target-target yang hendak dicapai (kualitatif dan kuantitatif)
- b) pemanfaatan sumber daya seoptimal mungkin
- c) program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas masukan instrumental.

A.2 Masukan mentah

- a) Bagaimana persyaratan calon mahasiswa
- b) Bagaimana cara prosedur dan alat penSeleksian calon mahasiswa
- c) Bagaimana pelayanan terhadap mahasiswa selama mereka studi
- d) Efisiensi, efektivitas dan produktivitas belajar mahasiswa.
- e) Jumlah mahasiswa yang mendapat beasiswa (terutama yang didasarkan atas bakat dan prestasi), atau penghargaan - penghargaan lainnya

A.3 Masukan instrumental :

A.3.1 Tenaga pengajar

- a. Bagaimana komposisi dan jumlahnya menurut kompetensi, status keahlian dan perbandingan terhadap jumlah mahasiswa.
- b. Intensitas keterlibatan dalam program - program akademis penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat.
- c. Partisipasi dan posisinya dalam badan - badan keilmuan atau profesi.
- d. Efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dosen.
- e. Penghargaan terhadap para pengajar.

A.3.2 Kurikulum

- a. Penentuan mata kuliah-mata kuliah yang relevan, satuan kreditnya, alokasi dalam setiap program,
- b. Penentuan proporsi bahan mengajar dosen, beban studi mahasiswa, klasifikasi (umum spesial, mayor, minor, nonkredit dsb) dan silabinya.
- c. Diferensiasi program dibandingkan dengan jumlah mahasiswa.

A.3.3 Perpustakaan

- a. Jumlah buku, relevansi buku dengan kurikulum, kebauran, dan dalam bahasa apa.
- b. Sistem perpustakaan dan pengelolaannya.
- c. Efisiensi dan efektivitas perpustakaan.

- d. Frekuensi pemakaian perpustakaan per mahasiswa, per staf pengajar.
- e. Rasio mahasiswa dengan jumlah buku dan bacaan lainnya (jurnal profesional).

A.3.4 Alat-alat pembantu pengajaran

- a. Jenis alat, kualitas, dan kuantitas
- b. Efisiensi dan efektivitas pemakaiannya

A.3.5 Bangunan fisik, pekarangan dan perlengkapan

- a. Ruang kuliah, praktikum, dosen, dsbnya kapasitas dan kondisinya
- b. Efisiensi dan efektivitas pemakaiannya.

A.3.6 Sumber daya dana

- a. Besarnya
- b. Pengalokasiannya.

B. Komponen Proses :

B.1 Proses pendidikan (akademis)

- a. Norma-norma akademis yang meliputi antara lain :
 - 1) beban studi suatu jenjang program
 - 2) beban studi rata-rata siswa
 - 3) indeks prestasi yang dituntut
 - 4) nilai syarat lulus
 - 5) persyaratan lain-lain seperti maksimum diperbolehkan mengulang ujian, lama belajar, batas kedaluwarsaan hasil capai belajar, kehadiran minimum mahasiswa dan dosen, serta tugas-tugas tambahan (laporan buku, kertas kerja, dan sebagainya).

- b. Didaktik dan metodik pengajaran, manajemen kelas (berdasarkan pendapat mahasiswa dan dosen sendiri), hubungan antara dosen dan mahasiswa.
- c. Iklim mengajar-belajar, kebebasan mimbar, keterbukaan dosen, kehadiran mahasiswa dan dosen
- d. Sistem penilaian hasil-hasil belajar
- e. Bimbingan dan penyuluhan
- f. Kegiatan ekstra kurikuler
- g. Pemakaian teknologi pengajaran atau pendidikan

B.2 Proses penelitian

- a. Penelitian murni
- b. Penelitian terpakai
- c. Keterlibatan dosen dan mahasiswa

B.3 Proses pengabdian kepada masyarakat

- a. Relevansi dengan kebutuhan nyata masyarakat
- b. Keterlibatan dosen dan mahasiswa.

B.4 Proses manajerial

- a. Kepemimpinan, pengorganisasian, kerukunan, dinamika kelompok, sistem penetapan dan pengangkatan pimpinan.
- b. Hubungan dengan masyarakat, responsivitas dan adaptabilitas.
- c. Efisiensi, efektivitas, produktivitas administratif.
- d. Peranan mahasiswa dalam manajemen perguruan tinggi.

C. Komponen keluaran

C.1 Keluaran pendidikan

- a. Kualitas dan kuantitas menurut masing-masing strata program
- b. Kualitas, efisiensi, efektivitas
- c. Tingkat keterserapan dalam masyarakat
- d. Peranan alumni dalam pengembangan perguruan tinggi.

C.2 Keluaran penelitian

- a. Kualitas dan kuantitas menurut jenis penelitian.
- b. Tingkat kepuasan pemakaian hasilnya oleh konsumen
- c. Efisiensi, efektivitas dan utilitas.

C.3 Keluaran pengabdian kepada masyarakat

- a. Kualitas dan kuantitas menurut penilaian masyarakat.
- b. Efisiensi, efektivitas dan utilitas
- c. Kepuasan mahasiswa dan dosen yang memberikan pengabdian

C.4 Keluaran sisa

- a. Banyaknya yang putus kuliah dan alasan-alasannya
- b. Banyaknya pengulang tingkat atau program dan alasannya.

Berbicara mengenai pembinaan mutu perguruan tinggi sebagai suatu sistem, perhatian tidak boleh semata-mata tertuju kepada masalah yang "terlalu mementingkan mutu yang tinggi (setinggi-tingginya) saja sehingga tuntutan akan

pembinaan segi-segi lainnya diabaikan. Dalam hal ini, yang sama pentingnya untuk diperhatikan ialah perimbangan antara tuntutan kualitas dan kuantitas. Berhubung dengan itu memandang perguruan tinggi sebagai sistem yang produktif, dari segi kualitas dan kuantitas, sangat perlu, Konsep Thomas (1975) tentang produktivitas setiap lembaga pendidikan dapat dikembangkan.

Secara ringkas konsep Thomas tersebut adalah seperti berikut :

- 1). Fungsi produksi administratif (FP1) yaitu fungsi produksi sebagai pusat perhatian administrator. Dalam fungsi ini yang menjadi keluaran adalah pelayanan. Satuannya dapat diukur dengan atau dalam satuan waktu pelayanan, seperti jam kuliah, jam bimbingan, dan sebagainya. Semakin banyak satuan pelayanan yang dapat diberikan kepada mahasiswa atau masyarakat, semakin produktif sesuatu perguruan tinggi. Kualitas pelayanan akan ditentukan oleh kualitas masukan instrumental yang menghasilkannya. Untuk memudahkan perhitungan dan perbandingan, masukan yang digunakan harus dikonversikan dulu ke dalam satuan biaya. Dengan demikian akan dapat dihitung biaya per jam mahasiswa, per jam penelitian, per jam pengabdian masyarakat dan sebagainya.

Dengan menghitung jumlah biaya pada suatu jangka waktu tertentu yang dipergunakan oleh sesuatu perguruan tinggi dapat diketahui berapa besar pelayanan yang diberikannya kepada mahasiswa dan masyarakat. Semakin tinggi perbandingan antara pelayanan yang dapat diberi-

kan dengan biaya yang digunakan semakin efisien. Atau semakin tinggi perbandingan antara pelayanan yang dapat diberikan secara nyata dengan yang direncanakan semakin efektif sistem tersebut.

Beberapa teknik menghitung pembiayaan per satuan komponen tertentu yang diberikan oleh Coombs dan Hallak (1972, h.306-313) dapat pula diperkembangkan dalam rangka penilaian secara operasional.

- 2). Fungsi produksi psikologis (PF2), yaitu yang menjadi pusat perhatian para ahli psikologi (pendidikan). Keluaran yang berkenaan dengan fungsi produksi ini ialah perubahan perilaku pada mahasiswa baik pada aspek kognitif, afektif dan konatif serta psikomotornya. Dengan sendirinya antara PF1 dan PF2 terdapat hubungan yang sangat kuat sebab keluaran dari PF1 itu justru untuk menghasilkan keluaran PF2. Dengan kata lain, pelayanan yang diberikan oleh sesuatu perguruan tinggi dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan perilaku mahasiswa. Jika pada PF1 pendekatan yang digunakan adalah perhitungan biaya, maka pada PF2 digunakan analisis statistika multivariabel.

Adanya perubahan perilaku dapat diketahui dari nilai tambah prestasi belajar mahasiswa. Secara teoritis, nilai-tambah prestasi (NTP) adalah selisih antara prestasi sesudah diberi pelayanan (PSP) dengan prestasi sebelum diberi pelayanan (PBP). Jika dimasukkan dalam rumus :

$$NTP = PSP - PBP$$

Masukan pada PF2 ini, kecuali waktu dosen dan karyawan administratif, buku-buku, perlengkapan dana (biaya) dan bahan-bahan lainnya (kuantitatif dan kualitatif) adalah juga waktu, minat, bakat dan motivasi mahasiswa sendiri yang sedikit banyaknya dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Untuk mengetahui pengaruh dari berbagai masukan ini digunakan analisis regresi (hubungan fungsional). Dengan analisis itu, posisi masing-masing anggota dapat pula ditentukan terhadap garis regresinya.

3). Fungsi produksi ekonomik (PF3), yaitu yang menjadi pusat perhatian para ahli ekonomi.

Mereka ini melihat pendidikan itu sebagai investasi yang memberikan sumbangan kepada kompetensi yang diperlukan oleh suatu sistem ekonomi. Sebaliknya sistem ekonomi memberikan pula kontribusi sumber daya ekonomik kepada penyelenggaraan pendidikan. Asumsi yang melatarbelakangi fungsi produksi ini ialah bahwa pendidikan, mempunyai nilai ekonomi baik pada komponen masukan, proses maupun pada keluaran. Nilai ekonomi yang terdapat pada komponen masukan dan proses pada dasarnya merupakan (dihitung sebagai) biaya, sedangkan nilai ekonomi keluaran adalah profitnya. Keluaran sistem pendidikan menurut PF3 ini adalah tambahan pendapatan individu yang dihasilkan oleh tambahan pendidikannya.

Salah satu komponen biaya yang harus diperhitungkan dalam pendekatan ekonomik ini ialah biaya kesempatan

(opportunity cost) waktu mahasiswa. Ada dua macam teknik analisis yang biasanya dipergunakan yakni (1) analisis nilai sekarang, dan (2) analisis suku kembalian. Metoda perhitungannya, pada dasarnya, adalah sama dengan yang biasa dipergunakan ahli-ahli ekonomi dalam mengukur atau menilai produktivitas modal fisis.

Dengan memperbandingkan nilai sekarang biaya yang telah dikeluarkan atau akan dikeluarkan dengan pendapatan individu atau kelompok individu akan **diketahui apakah pendidikan yang diberikan atau akan diberikan kepada mereka memberikan keuntungan secara ekonomi atau tidak.**

Rumus-rumus yang digunakan untuk perhitungan biaya yang akan dikeluarkan adalah :

$$NS (B) = \sum_t \frac{B_t}{(1 + r)^t}$$

di mana NS (B) adalah nilai sekarang biaya,

B_t ialah biaya pada suatu tahun tertentu

r adalah suku bunga per tahun

t ialah tahun yang berkenaan.

Rumus untuk perhitungan nilai sekarang biaya yang sudah digunakan ialah :

$$NS (B) = \sum_t B_t (1 + r)^{n-t}$$

di mana n adalah banyaknya tahun yang telah dilalui.

Sedangkan rumus nilai sekarang untuk menghitung pendapatan yang akan diperoleh ialah :

$$NS (P) = \sum_t \frac{P_t}{(1+r)^t}$$

di mana $NS (P)$ ialah nilai sekarang pendapatan

P_t adalah pendapatan pada tahun tertentu

r adalah suku bunga pertahun

t adalah tahun yang berkenaan

Keuntungan adalah selisih antara $NS(P)$ dengan $NS (B)$, atau

$$K = NS (P) - NS (B)$$

Dengan melihat besarnya keuntungan yang akan diperoleh individu atau kelompok individu, dapat pula diketahui pendidikan yang mana yang produktif secara ekonomik dan berapa tingginya produktivitas tersebut.

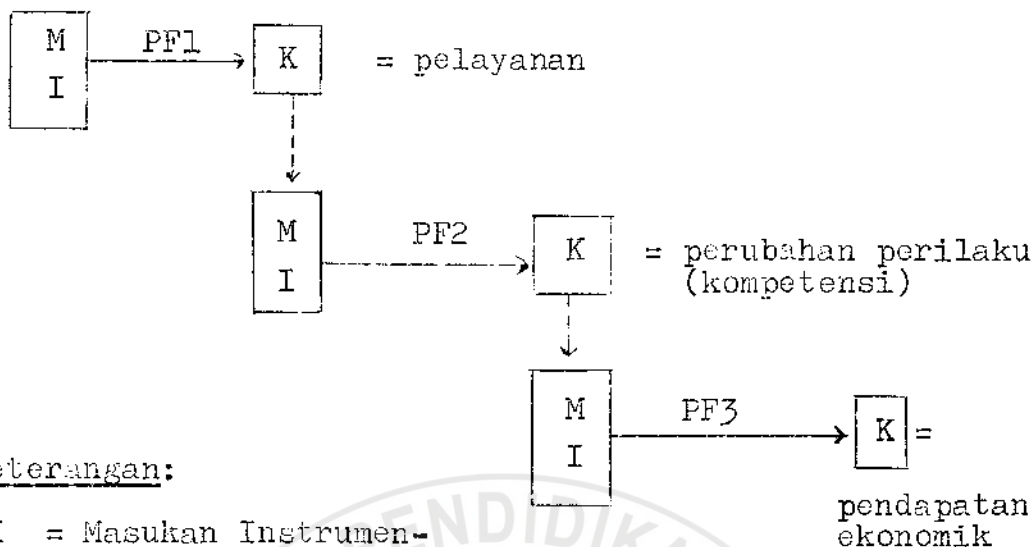
Analisis suku kembalikan diperlukan untuk mengetahui berapa besarnya persentase kembalikan per tahun sesuatu investasi sehingga memberikan nilai sekarang biaya selama waktu penginvestasian itu.

Dengan perkataan lain, berapa besarnya r pada rumus $NS (P)$ sehingga menghasilkan :

$$NS (P) - NS (B) = \sum_t \frac{P_t}{(1+r)^t} - \sum_t \frac{B_t}{(1+r)^t} = 0$$

Secara skematis hubungan ketiga fungsi produksi
 dan biaya sebagai berikut :

ini dapat digambarkan seperti berikut :



Keterangan:

MI = Masukan Instrumental

K = Keluaran

PF = Fungsi Produksi

—————> = menghasilkan

- - - - -> = menjadi

GAMBAR 19

SKEMA HUBUNGAN ANTARA KETIGA FUNGSI PRODUKSI (PF) SISTEM PENDIDIKAN

Dalam rangka penilaian diri sendiri perguruan tinggi di Indonesia, pendekatan dengan fungsi produksi (Thomas) ini, perlu dilakukan. Walaupun belum mungkin diterapkan kotiganya sekaligus (mengingat keterbatasan data dan instrumen yang ada), setidaknya kedua fungsi produksi yang pertama bisa dilakukan terlebih dahulu.

Konsep fungsi produksi Thomas ini tidak saja berguna sebagai alat untuk menilai produktivitas lemb-

ga sendiri, juga mempunyai implikasi yang sangat penting bagi para pengambil keputusan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan dana yang ada. Seperti dikatakan Thomas (1974, h. 9)

The central responsibility of the administrator is to create and operate a productive system. This implies that he must use the resources at his disposal to achieve, as fully as possible, the goals of system. It also suggests that he must monitor the system, using information about its performance at a given point in time in order to improve its subsequent operation (Tanggung jawab sentral administrator ialah menciptakan dan menggerakkan sesuatu sistem yang produktif. Ini mengandung arti bahwa dia harus menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia baginya, sepenuh mungkin, untuk mencapai tujuan-tujuan sistem. Hal itu juga menyarankan agar dia harus memonitor sistem itu, memanfaatkan informasi mengenai performansinya pada sesuatu saat tertentu untuk memperbaiki pekerjaan yang berikutnya).

Para pengambil keputusan (administrator) akan sangat terbantu oleh konsep ini dalam memilih alternatif-alternatif pencapaian hasil (keluaran) yang optimum, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, administratif, psikologik dan ekonomik.

7. Cara dan teknik penilaian

Semua komponen-komponen dengan kriterianya dijabarkan lagi secara terperinci ke dalam butir-butir yang dapat dihitung, dinilai, diskor dan dibobot (jika diperlukan). Jika penilaian bersifat kualitatif diusahakan mencari padanan (konversi)nya ke dalam kuantitatif.

Butir-butir ini disusun dalam suatu format tertentu yang mudah dibaca, dimengerti dan dikerjakan (diberi nilai, skor, atau cek) oleh penilai. Tentunya for-

mat itu disesuaikan dengan mereka yang akan dijadikan subyek (penilai), misalnya pimpinan, dosen, mahasiswa, anggota dewan penyantun, tokoh-tokoh masyarakat, alumni dan/atau badan tertentu yang ditunjuk pemerintah.

Format-format itu dapat berbentuk daftar cek, skala nilai, kuesioner, skala sikap, dan sebagainya. Beberapa model instrumen yang diperkenalkan oleh Dunn and Dunn (1977) menurut pendapat promovendus dapat digunakan dan dikembangkan di Indonesia.

Misalnya, instrumen penilaian gaya mengajar dosen yang mencakup sembilan unsur :

- a. Perencanaan instruksional
- b. Metoda-metoda pengajaran
- c. Pengelompokan-pengelompokan mahasiswa
- d. Disain ruangan
- e. Lingkungan pengajaran
- f. Teknik evaluasi
- g. Filsafah kependidikan
- h. Karakteristik pengajaran
- i. Preferensi mahasiswa.

Instrumen ini (dengan beberapa penyesuaian pada kondisi perguruan tinggi di Indonesia) dapat dipakai untuk menilai gaya mengajar dosen secara individual, baik oleh dirinya maupun menurut pendapat mahasiswa. Skor penilaian dapat dijadikan indikator seberapa jauh gaya mengajarnya telah mencapai tingkat efektivitas yang memadai jika dibandingkan dengan skor ideal menurut standar yang

ditetapkan bersama.

Jika semua dosen mau melakukan penilaian diri seperti itu, apalagi bila hasil penilaian mereka itu dapat dibandingkan dengan penilaian mahasiswa, promovendus yakin akan timbul motivasi untuk mempertahankan gaya mengajar yang sudah baik atau memperbaiki yang belum baik.

Apabila dalam sistem akreditasi ditetapkan bahwa setiap dosen harus melakukan penilaian atas gaya mengajarnya dengan instrumen Dunn and Dunn (1977, h. 155 - 164) maka salah satu kriteria penilaian untuk akreditasi dalam hal proses mengajar-beajar ialah ada atau tidaknya penilaian sendiri itu dilakukan.

Mengingat bahwa kualitas komponen keluaran amat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas komponen masukan , maka masalah pengukuran atau penilaian kedua komponen terdahulu perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.

Misalnya terhadap komponen masukan mentah, perlu diperhatikan sekali syarat-syarat penerimaan mahasiswa serta besarnya persentase penerimaan dibandingkan dengan banyaknya calon yang mendaftar. Kedua hal ini akan memberikan petunjuk tentang tingkat selektivitas, efisiensi dan efektivitas setiap perguruan tinggi dalam langkah awal dari suatu kegiatan operasional sesuatu sistem. Jika pada langkah awal ini saja sudah terdapat banyak kepincangan maka sebenarnya untuk langkah-langkah berikutnya akan lebih banyak lagi persoalan yang harus dipecahkan.

Dalam menilai komponen proses, terutama yang berkaitan dengan masukan instrumental, perlu dikaji dan di-

evaluasi butir-butir seperti berikut (Sikun Pribadi,1975):

- a. beban kredit untuk mencapai suatu jenjang akademis serta pencapaian gelar
- b. Indeks Prestasi Kumulatif minimal yang harus dicapai per jenjang akademis,
- c. jumlah kredit minimum yang diminta sebagai beban studi per semester,
- d. banyaknya kesempatan mengulang ujian yang diperkenankan,
- e. nilai batas untuk syarat lulus ujian,
- f. standar kehadiran mahasiswa untuk dapat diizinkan mengikuti ujian,
- g. standar jumlah minimum pemberian kuliah (pertemuan kelas) oleh dosen per semester,
- h. beban penugasan tambahan akademik (laporan buku, kertas kerja, dan sebagainya) per mata kuliah yang dituntut,
- i. persentase kehadiran mahasiswa di perpustakaan per semester/tahun,
- j. jumlah rata-rata buku yang dipinjam mahasiswa per semester/tahun,
- k. perbandingan antara banyaknya buku yang dipinjam dengan jumlah mahasiswa seluruhnya,
- l. produktivitas, efektivitas dan efisiensi penelitian yang dilakukan oleh dosen, baik terhadap yang melakukannya maupun terhadap jumlah dosen secara keseluruhannya, (sedapatnya diperinci)

menurut jenis-jenis penelitian: penelitian dasar, penelitian murni, dan penelitian terpakai. m. jumlah seminar, lokakarya atau pertemuan-pertemuan lainnya yang dihadiri oleh dosen per tahun/semester serta jumlah kerta-kerja, prasaran dan sejenisnya yang dihasilkan oleh para dosen (individual atau kelompok).

Semua nilai itu kemudian dikumpulkan, diolah dan ditafsirkan oleh masing-masing perguruan tinggi, berdasarkan standar, kriteria atau norma-norma yang disusun, baik secara nasional (makro) ataupun institusional (mikro).

Hasil penilaian dapat dibuatkan kategorisasinya, misalnya dalam bentuk nilai huruf A, B, C dan D yang dapat diartikan masing-masing : Sangat Baik, Baik, Sedang dan Kurang.

8. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian dapat disusun menurut langkah-langkah seperti berikut :

- a. Penentuan kriteria, standar atau norma-norma, pedoman dan petunjuk pelaksanaan penilaian. Dilakukan secara kolektif dan demokratis oleh unsur-unsur yang akan turut serta (diikutsertakan) di dalam penilaian.
- b. Swakaji dan swaevaluasi, dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi atau unit-unit dalam perguruan tinggi menurut pedoman dan petunjuk pelaksanaan penilaian.

- c. Validasi atau, verifikasi penilaian oleh badan akreditasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mendapatkan kepastian atau justifikasi bahwa swakaji dan swaevaluasi telah dilakukan sesuai dengan pedoman serta petunjuk-petunjuk pelaksanaannya.
 - d. Pengumuman hasil-hasil penilaian kepada masyarakat, melalui suatu daftar yang khusus diterbitkan untuk keperluan tersebut yang dinamakan daftar akreditasi. Dengan catatan kepada perguruan tinggi yang mencapai prestasi terbaik dapat diberikan penghargaan tertentu oleh negara (umpamanya).
9. Masalah praktis tujuan akreditasi

Seperti sudah disinggung di dalam motto pada bab ini, tujuan akreditasi tidak lain daripada menilai dan mendorong peningkatan mutu pendidikan. Penggunaan terhadap kepentingan-kepentingan lain seperti menutup perguruan tinggi-perguruan tinggi yang tidak memenuhi persyaratan atau mengurangi alokasi anggaran tahunan yang harus mereka terima, atau untuk mendeskreditkan perguruan tinggi tertentu, tidaklah dibenarkan. Jika ada perguruan tinggi yang harus ditutup karena tidak memenuhi persyaratan minimal, misalnya, hal itu bukan kebijaksanaan akreditasi, melainkan tindakan (oleh pemerintah) untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan-kemungkinan buruk akibat tidak terpenuhinya persyaratan tersebut (mungkin berdasarkan hasil penilaian dalam sistem akreditasi).

Akreditasi hanya memberikan informasi kepada pihak

yang berwenang atas adanya hal-hal yang tidak wajar. Jadi apabila ada sesuatu perguruan tinggi yang tidak bersedia untuk ikut dalam kegiatan itu sebenarnya, (jika mereka sudah mengerti maksud akreditasi itu) sudah dapat diduga bahwa mereka menyimpan atau menyembunyikan hal-hal yang tidak wajar.

Masalah ini promovendus kemukakan oleh karena dalam kalangan masyarakat sering ada pengertian yang keliru mengenai sistem akreditasi, yakni seolah-olah sistem itu akan mencabut hak hidup sesuatu perguruan tinggi atau program tertentu yang sedang dilakukan, padahal sistem akreditasi itu adalah alat pembinaan pendidikan tinggi.

Sistem akreditasi bahkan justru membantu untuk memperkuat hak hidup itu selagi potensi untuk tumbuh dan berkembang masih ada. Bahkan di mana perlu perguruan tinggi yang bersangkutan dapat meminta bantuan sumbangan pikiran, dari badan akreditasi untuk mencari jalan mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Terhadap sistem ini tidak ada yang perlu dikuatirkan selagi segala sesuatunya berjalan menurut aturan atau kebijaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu sebab mengapa usaha pembinaan mutu perguruan tinggi melalui klasifikasi Pembina, Madya dan Muda yang pernah dilakukan dahulu terhenti di tengah jalan, (menurut analisa promovendus) adalah karena kesalahpahaman ini dan kekeliruan dalam penggunaan hasilnya. Begitu ada penggolongan fakultas-fakultas atau jurusan - jurusan yang disebut Pembina maka implikasinya kepada kebijaksa-

naan pembinaan fakultas-fakultas dan jurusan-jurusan yang nonpembina menjadi berubah dalam arti kata perhatian pemerintah kepada yang nonpembina itu menjadi menurun, misalnya dengan memberikan fasilitas yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan yang pembina (sebelum ada klasifikasi). Keadaan yang demikian tentu saja dirasakan sebagai sesuatu yang merugikan kepada diri sendiri oleh perguruan tinggi nonpembina, yang jumlahnya relatif jauh lebih banyak, sehingga menimbulkan sikap resistensi yang semakin besar untuk mengikuti kebijaksanaan pembinaan mutu seperti itu.

Dalam penerapan sistem akreditasi di masa datang kekeliruan yang demikian hendaknya tidak akan terulang lagi. Oleh karena itu jauh-jauh sebelumnya "keluarga besar" perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia harus sudah diberi tahu bahwa sistem akreditasi tidak dimaksudkan untuk merugikan siapa-siapa kecuali mereka yang sengaja berbuat tidak benar.

Sistem akreditasi semata-mata hanya untuk mengajak kita mengenal diri (kemampuan-kemampuan dan kelemahan-kelemahan) kita lebih baik kepada masyarakat. Dan masyarakat perlu diberitahu jika dalam pelayanan kepada mereka (yang selalu menghendaki pelayanan yang sebaik mungkin) kemampuan kita dengan kondisi yang ada tidak mencapai titik jenuh yang maksimal, sehingga jika dipaksakan terus, yang akan rugi adalah masyarakat sendiri.

Sering sesuatu perguruan tinggi yang mungkin telah

berada pada titik jenuh (maksimal) itu masih "dipaksa" untuk memberikan pelayanan ekstra oleh kekuatan - kekuatan tertentu yang ada dalam masyarakat (yang tidak mengetahui adanya titik jenuh itu). Perguruan tinggi tidak dapat menolak "perkosaan" itu karena tidak punya alasan yang kuat. Dengan sistem akreditasi perguruan tinggi akan dapat berkata "tidak" bila masih dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak lagi benar.

Sistem akreditasi pada hakekatnya meluruskan yang bengkok, mempertahankan yang sudah lurus, asal pelaksanaannya dijalankan secara benar. Oleh karena itu dengan sistem akreditasi standar-standar atau norma-norma akademis yang selama ini belum baik secara berangsur-angsur akan diperbaiki, yang belum mantap akan dimantapkan, yang belum jelas akan menjadi jelas.

Misalnya, selama ini kita belum mempunyai kriteria yang jelas tentang pelaksanaan sesuatu penelitian ilmiah kecuali ketentuan pedoman tahun 1966 (SK Deputy Menteri Perguruan Tinggi No. 1 Tahun 1966) yang memuat ketentuan agar "Research diselenggarakan sesuai dengan ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku." Bagaimana halnya jika sesuatu hukum yang masih berlaku tetapi sebetulnya sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan masyarakat atau tuntutan masa kini, dan untuk fakta mengenai ketidaksesuaian itu diperlukan penelitian-penelitian, langkah apa yang harus dilakukan oleh sesuatu perguruan tinggi? Sebagai instansi yang seharusnya setia kepada kebenaran, perguruan-

an tinggi dalam hal ini berada dalam keadaan sulit sebab jika tidak diteliti hatinuraninya yang berontak, akan tetapi jika diteliti karena bertentangan dengan hukum yang berlaku, mungkin tidak diizinkan atau jika dipaksakan juga akan harus berhadapan dengan penegak-penegak hukum. Dalam keadaan-keadaan seperti ini mestinya harus ada ketentuan-ketentuan standar yang dapat dipedomani demi untuk keselamatan pribadi peneliti dan negara yang mempunyai hukum. Dengan sistem akreditasi hal-hal seperti itu tentu akan didudukkan.

Begitu pula dengan norma-norma kebebasan mimbar akademis, yang pedomannya justeru menyinggung perasaan keserjanaan. Misalnya dalam ketentuan yang ada dinyatakan agar kebebasan mimbar "tidak" digunakan dengan cara-cara dan tujuan menjilat, memfitnah, mengadu domba, menyebarkan laporan-laporan palsu dengan maksud ABS dan sebagainya." Dalam syarat-syarat pengangkatan tenaga edukatif perguruan tinggi (Lampiran II Surat Keputusan Menteri P & K No. 079/1970) sudah ditegaskan bahwa yang dapat diangkat itu adalah mereka yang memenuhi persyaratan atau kriteria yang sebenarnya telah menjamin tidak akan dilakukannya hal-hal yang tidak diinginkan di atas. Warga perguruan tinggi yang bertanggung jawab, budi pekerti yang baik, moral dan integritas yang tinggi, mestinya tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat fitnahan, laporan palsu, mengadu-domba dan sebagainya. Persoalannya, jika ada dosen yang karena rasa integritasnya yang tinggi

justeru mengemukakan fakta-fakta yang dianggap merugikan oleh mereka yang sedang berkuasa, kemudian dengan kekuasaan-nya itu menuduh dosen tersebut membuat fitnah atau adudomba, kepada siapa dosen itu harus meminta pembenaran atas fakta-fakta yang ditemuinya itu? Siapa yang dapat mengatakan bahwa kebebasan mimbar itu berjalan dengan baik atau terjamin pelaksanaannya? Melalui sistem akreditasi, para pengajar dan ilmuwan di perguruan tinggi dapat memberikan penilaian atas kebebasan mimbar akademis atau ilmiah yang ada, dibandingkan dengan yang diinginkan mereka.

Masalah kebebasan mimbar akademis dan kebebasan ilmiah, menurut pendapat promovendus, adalah masalah yang sangat urgen untuk dibicarakan jika mutu akademis dan ilmiah perguruan tinggi ingin ditingkatkan. Kecuali karena sifatnya yang dianggap fundamental dalam kehidupan perguruan tinggi (Ross, 1976, h.191) adalah juga karena mencerminkan kepercayaan diri (perguruan tinggi) sendiri dan kepercayaan masyarakat atas ketinggian rasa tanggung jawab akademis dan ilmiah sesuatu perguruan tinggi. Masalahnya terletak pada kesatuan penafsiran atas apa yang dimaksud dengan kebebasan mimbar akademis dan kebebasan ilmiah, sebab konsep itu dapat ditafsirkan secara berbeda-beda menurut tempat serta waktu, bahkan menurut kepentingan-kepentingan tertentu. Hal yang demikian kecuali telah menempatkan tenaga pengajar dan peneliti di perguruan tinggi dalam keadaan sulit bahkan terancam keselamatannya oleh ke-

kuatan-kekuatan nonilmiah di luar perguruan tinggi, juga meresahkan. Bahkan menimbulkan keadaan tak terkendali pada kekuasaan formal dalam masyarakat merasa kepentingannya terusik oleh kebebasan akademis dan ilmiah tersebut sehingga terdorong untuk menggunakan kekuasaan yang ada pada mereka. Keadaan sedemikian bukan sekarang saja, akan tetapi telah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu, seperti dikemukakan oleh Ross, h.191).

Whenever the university has housed people of great intelligence, curiosity, and creativity, it has inevitably explored ideas that were in advance of contrary to, or unpopular with those prevailing in society particularly the ideas and beliefs of the formal leaders of society, were they heads of church or state. There has been, therefore, throughout the centuries pressure by external authorities to limit the freedom of expression of leading scholars in the most vital universities. There is a long history of repression of free thought and expression in the university, sometimes accepted with calm submissiveness and at other times resisted with vigor. (Kapan saja universitas dihuni oleh tokoh besar inteligensia, kuriositas dan kreatifitas, akan mempunyai ide-ide yang tidak dapat tidak telah dijelajahi, yang lebih maju, bertentangan atau tidak terkenal seperti yang sudah berlaku umum dalam masyarakat terutama ide-ide atau keyakinan-keyakinan pemuka gereja atau negara. Oleh karena itu, selama berabad-abad selalu ada saja tekanan oleh kekuasaan di luar untuk membatasi kebebasan menyatakan pendapat para ahli-ahli terkemuka pada universitas-universitas penting. Pengekangan terhadap pikiran bebas dan pernyataan pendapat pada universitas, sejarahnya telah berlangsung lama, kadang-kadang diterima dengan ketundukan yang tenang dan pada waktu yang lain dilawan dengan tegas).

Kiranya sudah tiba masanya, kecuali untuk mendudukkan masalahnya, juga menyusun suatu kode etik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hak-hak kewajiban - kewajiban para pengajar perguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademis dan kebebasan ilmiah itu secara wajar.

10. Langkah-langkah persiapan penerapan

Sementara konsep-dasar sistem akreditasi dikembangkan dan instrumen-instrumen, teknik dan prosedur penilaian mutu perguruan tinggi disusun dan dimatangkan, kondisi sosial atau lingkungan juga perlu dipersiapkan. Inovasi sebagai suatu perubahan yang berencana (Onushkin, 1971; Dalling 1978, Hersey and Blanchard, 1978), memerlukan suatu disain, yang tidak saja berkenaan dengan apa yang akan diinovasikan, juga siapa, di mana dan bagaimana menginovasi.

Masalahnya karena setiap perubahan di samping mempunyai faktor-faktor pendukung juga memiliki hambatan-hambatan. Kedua macam kekuatan yang berlawanan ini dapat dilihat dari berbagai dimensi.

Berman dan Mc Laughlin (1975) mengemukakan empat dimensi inovasi yang bersifat kritis :

- a. Sentralitas, yakni seberapa jauh sesuatu inovasi mengadakan perubahan terhadap tujuan, norma atau pola-pola tingkah laku yang merupakan pusat atau inti sesuatu pranata atau institusi;
- b. Kompleksitas, yaitu seberapa jauh inovasi mempunyai susunan atau struktur sistem perlakuan yang rumit dan seberapa jauh akan mempengaruhi perilaku kelompok-kelompok di dalam sesuatu sistem.
- c. Hakikat dan banyaknya perubahan, adalah seberapa besarnya atau tingginya tingkat kesulitan yang harus dikuasai oleh para implimentator sebagai individual dan seberapa jauh perubahan yang diharapkan.

- d. Konsonansi, ialah tingkat kecocokan atau kesesuaian antara tujuan, nilai-nilai dan praktik institusi yang menerapkan.
- e. Visibilitas, yakin seberapa jauh usaha-usaha inovatif dapat diamati, atau dimonitor oleh yang bukan peserta, baik dari dalam maupun dari luar institusi.

Keempat dimensi itu bertalian erat dengan unsur-unsur yang selalu terlibat dalam berbagai macam perubahan. Unsur-unsur itu dikemukakan oleh Dalin (1978); (1) perubahan teknologis, (2) perubahan berperilaku, (3) perubahan keorganisasian, dan (4) perubahan sosial. Ke dalam unsur-unsur ini perlu ditambahkan satu lagi yaitu (5) perubahan nilai-nilai.

Dalam hubungan ini peranan kepemimpinan dan perencanaan sangat menentukan. Supaya pemimpin-pemimpin mendapatkan hasil yang optimal, mereka harus memiliki ketrampilan mendiagnosa dan kemampuan beradaptasi (Hersey dan Blanchard, 1978, h.273). Ketrampilan mendiagnosa diperlukan untuk mengetahui (a) apa sesungguhnya yang sedang terjadi, (b) apa yang mungkin bakal terjadi, (c) apa yang sebenarnya diharapkan terjadi (d) dan hambatan - hambatan apa yang menghalangi (yang terdapat di antara keadaan nyata dan yang dicita-citakan).

Sedangkan kemampuan untuk beradaptasi diperlukan di dalam pengimplimentasian, karena para pemimpin harus dapat mengelola kekuatan-kekuatan lapangan (Lewin, 1951) yang terdiri dari kekuatan-kekuatan pendukung dan kekuat-

an-kekuatan penahan atau penghambat, serta mengelola konflik-konflik yang ditimbulkannya (Thomas dan Benin, 1972).

Keberhasilan sesuatu inovasi akan banyak ditentukan oleh pemilihan strategi yang tepat. Dalam pemilihan ini para pemimpin akan berhadapan dengan alternatif: perubahan yang partisipatif, atau yang direktif atau kombinasi antara keduanya. Perubahan yang bersifat partisipatif adalah yang dimulai dari tingkat mikro (individu) menuju ke tingkat makro (organisasional) atau dari bawah ke atas dengan penyertaan partisipan secara demokratis. Perubahan direktif adalah yang sebaliknya. Ketiga macam strategi itu memerlukan persyaratan-persyaratan kualitatif kepemimpinan yang sedikit banyaknya berbeda, karena cara-cara pendekatan untuk menggerakkan perubahan itu juga berbeda.

Dalam rangka penerapan sistem akreditasi, kecuali pemilihan saat yang tepat, juga perlu dipikirkan strategi perubahan dan kemampuan pimpinan yang diperlukan pada semua tingkatan keorganisasian perguruan tinggi. Masalahnya, dalam penginovasian sistem itu kita akan berhadapan dengan tiga fase perubahan: pencairan, perubahan, dan pembekuan kembali (Lewin, 1947).

Dalam fase pencairan, semua kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, aturan-aturan dan struktur lama yang tidak sesuai dengan tujuan inovasi harus dicairkan untuk memberi tempat kepada hal-hal baru yang diinginkan sebagai pengganti kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, aturan-aturan lama

yang harus diganti itu. Setelah itu datang fase kedua yaitu proses pengubahan, yang terjadi melalui mekanisme identifikasi dan internalisasi unsur-unsur yang baru, atau pembauran antara yang lama dengan yang baru.

Setelah fase kedua dilalui, fase ketiga dengan proses pembekuan kembali (lagi) hal-hal yang sudah diubah, mau tidak mau, harus dimasuki, supaya inovasinya memberikan hasil yang nyata. Pola-pola perilaku yang baru seperti perhatian yang besar terhadap mutu akademis, motivasi kepegawasan yang bersifat internal, kesediaan untuk melakukan swakaji, swaevaluasi dan validasi eksternal, yang dilandasi oleh motivasi berprestasi atau berproduksi yang tinggi pada diri individu dan institusi perguruan tinggi, mestilah mendarah daging (terpadu) ke dalam pendidikan tinggi di Indonesia.

Dalam rangka penyiapan kondisi sosial yang menunjang ini, perhatian harus lebih dicurahkan kepada berbagai hambatan yang mungkin timbul. Pada garis besarnya, ada empat macam hambatan (Dalin, 1978) yang perlu diantisipasi untuk diusahakan penanggulangannya :

- a. Hambatan nilai-nilai yaitu hambatan yang berpangkal kepada kepercayaan atau cita-cita perorangan atau kelompok tertentu di dalam masyarakat seperti: sentralisme atau desentralisme, strukturalisme atau formalisme, evaluasionisme atau radikalisme, demokrasi atau otokrasi dan sebagainya.
- b. Hambatan kekuasaan, yakni hambatan karena pendistribusi-

sian wewenang atau otoritas yang tidak memadai, atau tidak sesuai, setiap inovasi memerlukan kekuatan formal (baik governmental atau administratif) untuk pelaksanaannya. Tanpa alokasi, distribusi atau delegasi kewenangan yang tepat, implimentasi sistem akreditasi tidak akan berhasil secara nyata.

- c. Hambatan-hambatan praktis, yaitu yang berpangkal kepada hal-hal yang bersifat praktis, seperti aplikasi yang keliru karena kurang pengertian, atau kesalahurutan karena manajer yang kurang adaptif pengambilan keputusan yang tidak tepat, perencanaan yang kurang dinamis dan fleksibel dan sebagainya.
- d. Hambatan-hambatan psikologis, yakni hambatan yang disebabkan resistensi perorangan atau kelompok yang secara psikologis merasa dirugikan oleh adanya perubahan akibat inovasi. Misalnya, sabotase, tidak peduli, tidak mau ambil bagian atau menentang secara blak-blakan penerapan sistem tersebut.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan, kecuali diperlukan kebijaksanaan-kebijaksanaan secara nasional terutama yang bersifat keputusan-keputusan politik yang mendukung harus diambil dan pendekatan kasus demi kasus harus dilakukan. Komunikasi dua arah harus terjamin, dialog antara inovator, adapter dan fasilitator harus terus-menerus dijalankan. Pendekatan berdasarkan prinsip "cognitive flexibility dan psychological openness" (Allen and Whiteley , 1968) harus diterapkan terutama untuk mengurangi semini-

mal mungkin "psychological overhead" (Laird, 1956) yang menghambat, dalam arti kata, peningkatan efisiensi pribadi digalakkan.

Beberapa kondisi sekarang ini yang telah memberikan prospek yang baik bagi penerapan sistem akreditasi antara lain ialah :

- a. Adanya dorongan dan kemauan kuat, terutama di kalangan pemerintah untuk memperbaharui Undang-undang Pokok Pendidikan yang sudah tentu akan mempunyai implikasi besar bagi pembaharuan sistem pendidikan tinggi di masa datang. Usaha-usaha pembaharuan ini tentunya bukan hanya untuk sekedar memenuhi tuntutan kuantitas, akan tetapi juga kualitas.
- b. Adanya penggarisan arah pengembangan pendidikan tinggi kepada pembinaan mutu seperti yang tertuang di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (1978).
- c. Adanya konsep dasar pengembangan pendidikan tinggi jangka panjang seperti yang termuat dalam Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (D.A. Tisna Amidjaja, 1977).
- d. Adanya semangat perencanaan (panning oriented) di kalangan perguruan tinggi sendiri, walaupun belum sepenuhnya kriteria perencanaan itu terarah kepada pembinaan mutu.
- e. Adanya gugahan-gugahan dari Menteri P dan K untuk menggalakkan pembinaan mutu pendidikan tinggi (Pikiran Rakyat, 25 September 1979, Kompas 17 Oktober 1979) dan

konsep Normalisasi Kehidupan Kampus yang secara internasional cukup baik.

Yang diperlukan sekarang ialah mensinkronkan semua keadaan ini ke dalam suatu usaha atau program konkrit sebagai persiapan ke arah penerapan sistem akreditasi.

11. Perlunya proyek perintis

Seperti yang sudah diungkapkan bahwa langkah penerapan sistem akreditasi sebenarnya amat strategis, oleh karena itu jika penerapannya mengalami kegagalan, kerugian sosial, kultural psikologis dan ekonomis yang ditimbulkan akan sangat besar. Pengaruhnya akan berkesan secara longitudinal. Oleh karena itu penerapan sistem ini perlu dilakukan secara berhati-hati.

Uji-coba demi uji-coba harus dilaksanakan terlebih dahulu, terutama dalam pemakaian instrumen-instrumen, penyusunan kriteria dan standar-standar atau norma-norma yang akan dipakai. Implikasi dan efek-efeknya harus dikaji dan dianalisis secara mendalam dan obyektif. Untuk itu ada baiknya bila dalam rangka persiapan, diadakan proyek perintis terlebih dahulu.

Proyek perintis ini sebaiknya dijalankan pada satu atau dua perguruan tinggi "muda" dan relatif kecil. Alasannya, ialah :

1. Strukturnya belum begitu kompleks
2. Tradisi-tradisinya belum terlalu mapan
3. Masalah mutunya lebih kritis

4. Sebagian tenaga pengasuh relatif masih muda karena itu lebih progresif dan dinamis.

Pendapat promovendus ini sejalan dengan pendapat Butterfield (Onushkin, 1971, h.47).

If there are to be radical changes or even interesting experiment, it would seem that these can emerge only in the newest universities at all. One of the most exciting features of present-day educational movement is the special creative opportunity that is open to the new universities, just where originality is urgently needed and older universities are too committed to existing systems. (Jika ada perubahan-perubahan yang radikal atau eksperimen-eksperimen yang menarik, tampaknya hanya akan dapat muncul pada universitas terbaru di antara semuanya salah satu gambaran yang menarik pada gerakan kependidikan sekarang ini ialah kesempatan kreatif yang khusus yang terbuka bagi perguruan tinggi-perguruan tinggi baru, justeru di mana orisinalitas sangat diperlukan dan di mana universitas-universitas tua sudah terlalu terikat kepada sistem yang ada).

Jika proyek perintis dicobakan pada perguruan tinggi yang sudah mapan hasil yang akan diperoleh hanya sekedar inovasi marginal (Onushkin, 1971, h.46).

Walaupun proyek perintis dilakukan pada salah satu atau lebih perguruan tinggi yang muda, namun keterlibatan satu atau dua perguruan tinggi yang sudah mapan tidak dapat dihindarkan bahkan justeru diperlukan. Masalahnya terletak dalam penilaian, terutama mengenai isi kurikuler dan keprofesian. Hampir semua tenaga ahli yang memenuhi syarat dan berpengalaman berada di perguruan tinggi-perguruan tinggi yang sudah mapan. Hanya mereka yang dapat diharapkan dapat memberikan penilaian yang tepat dalam arti kata memberi validasi kepada penilaian sendiri oleh perguruan tinggi yang muda. Penilaian mereka tidak dapat

digantikan oleh orang lain seperti diungkapkan dalam buku Guide for the Evaluation of Institutions of Higher Education (1970) "... there is no substitute for good judgment made by professionally qualified persons" (... tidak ada satu pun pengganti bagi penilaian yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah memenuhi syarat secara profesional).

Dapat juga proyek perintis ini dilakukan dalam bentuk kerjasama antara satu atau lebih perguruan tinggi yang baru dengan yang sudah mapan atau dalam bentuk-bentuk lain di mana terdapat unsur-unsur perguruan tinggi yang dinilai sudah cukup tinggi kualitasnya dengan yang masih rendah bekerjasama atau melibatkan diri secara aktif. Untuk suksesnya, proyek sedemikian itu sebaiknya dipertanggungjawabkan langsung kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dalam arti kata, proyek yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan tetapi dilaksanakan (dititipkan) pada satu atau dua perguruan tinggi yang dijadikan proyek perintis.

Hasil percobaan-percobaan pada proyek perintis dibicarakan pada suatu forum tertentu serta dikaji kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahannya untuk disempurnakan dan dimatangkan dalam rangka persiapan penerapannya secara luas.

Sementara itu, perlu pula disadari bersama bahwa usaha-usaha penerapan sistem akreditasi sebagai inovasi tidak akan mencapai hasil yang optimal apabila tidak didu-

kung oleh perilaku yang adaptif dan kondusif dari pihak pimpinan pendidikan tinggi pada tingkat tinggi seperti Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, bahkan oleh Departemen P dan K khususnya, Pemerintah pada umumnya. Seperti yang sudah disinggung pada pembicaraan mengenai implikasi sistem ini, penerapannya akan membawa perubahan-perubahan yang bersifat reformasi, institusional, governmental dan profesional.

Persoalannya, seberapa jauh kesediaan di pihak pemerintah, institusi dan profesi menerima dan mendukung reformasi tersebut. Gambarannya akan terlihat pada respon dari masing-masing unsur tersebut baik yang terbuka maupun tertutup. Untuk itu pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi perlu pula mengadakan swakaji serta swaevaluasi pada instansinya sendiri.

